Sabda, Nalar Publik, dan Masyarakat Majemuk: The Cohesive Tetrad sebagai Arsitektur Tata Kelola Kebenaran Demokratis

Ade Zaenal Mutaqin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
Penulis korespondensi: suratkiade@gmail.com
ORCID: 0009-0001-4114-3679

Abstrak

Demokrasi-demokrasi kontemporer sangat bergantung pada bahasa martabat manusia, hak-hak, dan kebaikan publik ketika membenarkan hukum dan kebijakan, namun model-model dominan mereka tentang nalar publik dirancang untuk menjaga agar rujukan eksplisit kepada Sabda, yang di sini dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, tetap berjarak dari struktur pembenaran publik *(Rawls 1993, 1997; Habermas 1996, 2006)*. Bertolak dari karya-karya sebelumnya yang mengembangkan The Cohesive Tetrad sebagai kerangka tata kelola kebenaran dan berargumen bahwa logika murni, kapasitas manusia, evolusi, dan kontrak sosial tidak memadai untuk mendasari klaim-klaim martabat yang paling kuat dalam hukum dan kebijakan *(Mutaqin 2025a, 2025b; Waldron 2012; Nussbaum 2006)*, artikel ini melakukan tiga langkah. Pertama, artikel ini merekonstruksi model-model nalar publik Rawlsian, Habermasian, dan netralitas liberal serta menunjukkan bahwa, di bawah tekanan dari aksioma-aksioma martabat minimal, model-model tersebut cenderung bergeser baik menuju sekularisme kosong, di mana prosedur demokratis tetap ada tetapi cakrawala norma dan telos menjadi hampa, maupun menuju teokrasi penuh ketakutan, di mana satu penafsiran atas Sabda diangkat menjadi otoritas politik yang terlindungi dari koreksi *(Taylor 2007; Forst 2012; Casanova 1994)*. Kedua, artikel ini mengartikulasikan The Cohesive Tetrad sebagai sebuah arsitektur enam register bagi tata kelola kebenaran demokratis yang dibangun di seputar Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment, yakni derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak moral epistemik, serta mendefinisikan ulang nalar publik sebagai praktik multi-register di mana semua klaim tentang hukum koersif harus melewati register-register ini di bawah kondisi universalitas pihak yang disapa, tidak adanya pemaksaan terhadap nurani, penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan terhadap perbedaan pendapat *(Fraser 1990, 2008; Forst 2012; MacIntyre 1981)*. Ketiga, artikel ini menerapkan arsitektur tersebut pada kasus-kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola kecerdasan buatan, dengan membandingkan keluaran yang dihasilkannya dengan keluaran dari sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan *(Kittay 1999; Fineman 2008; Pellegrino 1999; O'Neil 2016; Eubanks 2018)*. Hasilnya adalah sebuah model tata kelola kebenaran demokratis di bawah Sabda yang mempertahankan capaian-capaian inti liberal sekaligus menyediakan dasar yang lebih stabil bagi klaim-klaim martabat yang kuat dalam masyarakat majemuk serta mempersiapkan jalan bagi analisis lanjutan mengenai hukum dan kecerdasan buatan.

Kata kunci: *Sabda; martabat manusia; nalar publik; pluralisme; tata kelola kebenaran demokratis; The Cohesive Tetrad; kecerdasan buatan; sekularisme; teokrasi.*

1. Pendahuluan

Demokrasi-demokrasi kontemporer berbicara dengan fasih dalam bahasa martabat manusia, hak-hak, dan kebaikan publik. Konstitusi-konstitusi menyatakan harkat melekat setiap orang, pengadilan-pengadilan menginvokasi martabat untuk memutus kasus-kasus sukar, dan dokumen-dokumen kebijakan secara rutin membenarkan intervensi dengan merujuk pada perlindungan kehidupan yang rentan *(Waldron 2012; Andorno 2013; Nussbaum 2006)*. Kosakata ini bukan sekadar hiasan. Ia memikul bobot normatif yang besar, terutama ketika masyarakat memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan di batas hidup dan mati, inklusi sosial, dan kendali teknologi.

Pada saat yang sama, di banyak demokrasi, energi moral terdalam yang menggerakkan pergulatan publik demi keadilan dan perlindungan yang rentan secara eksplisit berakar pada tradisi-tradisi keagamaan dan pada klaim akan suatu Sabda yang berbicara dengan kewibawaan tentang siapa manusia itu dan untuk apa mereka ada *(Casanova 1994; Taylor 2007)*. Gerakan-gerakan yang membela kaum miskin, memprotes penghinaan, atau menentang bentuk-bentuk eksploitasi yang merendahkan martabat sering kali bersandar pada kitab suci, liturgi, dan memori komunal yang secara eksplisit dirangkaikan sebagai respons terhadap suatu seruan pewahyuan. Namun model-model teoretis dominan yang mengatur apa yang dihitung sebagai pembenaran publik yang sah cenderung memandang sumber-sumber semacam itu hanya dapat diterima dalam register privat atau motivasional. Warga boleh digerakkan olehnya, tetapi pada suatu titik mereka diharapkan menerjemahkan alasan-alasan mereka ke dalam kosakata yang tidak bergantung pada sumber pewahyuan tertentu mana pun.

Hal ini menghasilkan teka-teki sentral yang menggerakkan artikel ini. Di satu sisi, khalayak demokratis sangat bersandar pada kosakata moral yang tebal tentang martabat manusia dan telos ketika mereka bertanya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap pribadi-pribadi dalam ranah hukum, kebijakan, dan teknologi. Di sisi lain, teori-teori arus utama tentang nalar publik dirancang untuk menjaga agar klaim-klaim yang secara eksplisit menginvokasi suatu Sabda dengan kewibawaan atas norma dan telos tetap berjarak dari struktur pembenaran publik *(Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Audi and Wolterstorff 1997)*. Dengan demikian, demokrasi-demokrasi bergantung pada bahasa moral yang, bagi banyak warganya, tak terpisahkan dari Sabda, sementara teori-teori resmi mereka tentang nalar publik ragu untuk mengakui Sabda sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sumber motivasi privat.

1.1 Dari logika murni ke martabat dan telos: lintasan The Cohesive Tetrad

Artikel ini merupakan langkah ketiga dalam sebuah proyek yang lebih luas yang mengembangkan The Cohesive Tetrad sebagai kerangka bagi tata kelola kebenaran *(Mutaqin 2025a, 2025b)*. Langkah pertama menelaah status logika murni dan rasionalitas intra-duniawi dalam tata kelola tersebut. Langkah itu berargumen bahwa logika, yang dipahami sebagai pengelolaan disiplin atas inferensi, konsistensi, dan kejernihan konseptual, bersifat niscaya namun tidak memadai untuk memainkan peran sebagai otoritas tertinggi. Logika dapat menguji dan memperjelas klaim. Ia dapat mengembangkan implikasi yang sudah tersirat dalam premis-premis. Namun logika tidak dapat, dengan sendirinya, menghasilkan norma dan telos yang memberitahu kita apa yang baik, apa yang terlarang, dan untuk apa kehidupan manusia itu.

Langkah kedua beralih ke wilayah martabat manusia dan telos. Langkah itu menanyakan apa yang dibutuhkan jika kita ingin secara serius menanggapi klaim-klaim terkuat yang diajukan

demokrasi-demokrasi kontemporer tentang harkat manusia. Langkah tersebut mengajukan seperangkat aksioma martabat minimal dan berargumen bahwa, diambil bersama-sama, aksioma-aksioma ini tidak dapat dibuat sepenuhnya koheren hanya dengan merujuk pada kapasitas-kapasitas manusia, sejarah evolusioner, atau kontrak-kontrak sosial *(Mutaqin 2025b; Waldron 2012; Nussbaum 2006; Sangiovanni 2017)*. Ketiga kandidat ini menerangi aspek-aspek penting kehidupan moral, namun mereka tidak dapat, sendiri-sendiri maupun dalam kombinasi, menanggung seluruh bobot klaim tentang martabat yang melekat dan setara, non-instrumentalisasi, inklusi terhadap yang paling rentan, dan akuntabilitas institusional jangka panjang.

Atas dasar itu, karya sebelumnya memperkenalkan Sabda, yang didefinisikan sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, sebagai cakrawala yang niscaya agar aksioma-aksioma martabat minimal dapat dipahami *(Mutaqin 2025a, 2025b)*. Sabda tidak melayang sendirian. Sabda terbenam di dalam The Cohesive Tetrad, sebuah konfigurasi enam register yang bersama-sama membentuk arsitektur bagi tata kelola kebenaran: Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment. Sabda menetapkan cakrawala norma dan telos. Logika menguji koherensi dan implikasi. Qualia menamai pengalaman hidup individu dan komunitas di bawah rezim hukum, kebijakan, dan teknologi. Mistika didefinisikan sebagai *Mistika, the intentional–spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*. Akhlak berkaitan dengan karakter moral yang teramati dari pribadi-pribadi dan institusi-institusi. Intention–Trace Alignment didefinisikan sebagai *Intention–Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic moral trace across time*. Artikel ini mengambil definisi-definisi tersebut dan aksioma-aksioma martabat sebagai latar *(Mutaqin 2025a, 2025b)*. Artikel ini tidak berupaya mengajukan kembali argumen dasarnya. Sebaliknya, artikel ini menanyakan apa yang mengikuti ketika kerangka ini dibawa ke wilayah politik yang secara eksplisit berkaitan dengan nalar publik dalam masyarakat majemuk.

1.2 Beralih ke ranah politik: nalar publik dan pluralisme mendalam

Dengan latar itu, fokus artikel ketiga ini beralih dari pertanyaan-pertanyaan metafisik dan aksiologis tentang norma dan telos ke sebuah pertanyaan politik. Pertanyaannya adalah bagaimana klaim-klaim atas kebenaran, terutama yang berakar pada Sabda, seharusnya hadir dalam penalaran publik demokratis di bawah kondisi pluralisme mendalam *(Rawls 1993; Habermas 1996; Forst 2012)*.

Pluralisme mendalam lebih dari sekadar keberagaman preferensi atau gaya hidup. Ia merujuk pada koeksistensi doktrin-doktrin komprehensif, pandangan dunia, dan otoritas epistemik yang tidak dapat direduksi satu sama lain dan tidak dapat begitu saja diperingkatkan dalam satu hierarki imanen. Dalam konteks semacam ini, institusi-institusi demokratis diharapkan membenarkan hukum dan kebijakan mereka kepada warga yang saling berbeda pendapat, terkadang secara sangat mendalam, tentang Tuhan, kitab suci, pewahyuan, dan struktur ultimate realitas.

Jawaban arus utama dalam teori politik adalah mengembangkan model-model nalar publik. Model-model ini, dalam cara mereka masing-masing, berbagi sebuah intuisi umum. Pembenaran politik yang sah bagi pokok-pokok konstitusional dan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keadilan tidak boleh bergantung pada klaim-klaim yang hanya dapat secara wajar diterima oleh penganut satu doktrin komprehensif tertentu. Alasan-alasan religius boleh memainkan peran dalam masyarakat sipil dan boleh memotivasi warga secara individual, tetapi

pada suatu titik dalam proses pembenaran publik, alasan-alasan tersebut harus diterjemahkan ke dalam alasan-alasan yang tidak mengandaikan otoritas Sabda tertentu mana pun *(Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Audi and Wolterstorff 1997)*. Namun, begitu kita menerima kesimpulan dari artikel-artikel sebelumnya, sebuah pertanyaan menjadi tak terelakkan. Jika klaim-klaim terkuat kita tentang martabat manusia dan telos dalam kehidupan demokratis memerlukan Sabda sebagai cakrawala, dan jika Sabda didefinisikan justru sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, apa yang terjadi ketika model-model nalar publik bersikeras bahwa Sabda paling jauh hanya boleh menjadi latar motivasional privat, sementara pembenaran publik final harus tetap independen dari sumber pewahyuan mana pun *(Larmore 1996; Quong 2011; Mutaqin 2025b)*? Artikel ini menjadikan ketegangan tersebut sebagai objek analisis utamanya.

1.3 Tesis dan kontribusi

Tesis utama artikel ini dapat dinyatakan secara langsung. Jika kita menanggapi dengan serius baik komitmen-komitmen terkuat kita terhadap martabat manusia dan telos maupun realitas pluralisme mendalam, maka model-model nalar publik dominan yang memprivatisasi Sabda bersifat tidak stabil secara struktural. Model-model tersebut berosilasi antara sekularisme kosong, di mana sumber-sumber norma dan telos dibiarkan tanpa nama, dan sebuah sikap defensif yang tanpa sengaja menyuburkan proyek-proyek reaktif penangkapan teokratis *(Taylor 2007; Forst 2012)*. Dengan mengintegrasikan Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, ke dalam arsitektur multi-register The Cohesive Tetrad, kita dapat merumuskan sebuah model tata kelola kebenaran demokratis di mana Sabda hadir secara publik di bawah kondisi-kondisi terdisiplin yang melindungi kebebasan-kebebasan dasar, akuntabilitas institusional, dan martabat para pihak yang berbeda pendapat *(Mutaqin 2025b; Rawls 1997; Habermas 2006; Forst 2012)*.

Dari tesis ini mengalir empat kontribusi spesifik. Pertama, artikel ini menawarkan diagnosis sistematis atas model-model nalar publik Rawlsian, Habermasian, dan netral liberal dari sudut pandang aksioma-aksioma martabat dan peran Sabda yang dikembangkan dalam karya sebelumnya *(Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Larmore 1996; Quong 2011)*. Diagnosis ini bersifat rekonstruktif, bukan semata-mata eksternal. Kedua, artikel ini mengembangkan konsep tata kelola kebenaran demokratis sebagai sebuah arsitektur konkret, bukan sekadar metafora, dengan bertumpu pada The Cohesive Tetrad sebagaimana dirumuskan dalam karya sebelumnya *(Mutaqin 2025a, 2025b; Forst 2012)*. Ketiga, artikel ini mendefinisikan ulang nalar publik sebagai sebuah proses multi-register, bukan kosakata satu register, dengan mengaitkannya pada perdebatan tentang pembenaran dan ruang publik *(Forst 2012; Fraser 1990, 2008)*. Keempat, artikel ini menunjukkan daya pembeda arsitektur ini melalui kasus-kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola sistem digital dan kecerdasan buatan *(Pellegrino 1999; Fineman 2008; O'Neil 2016; Eubanks 2018; Cath 2018; Floridi and Cowls 2019)*, dan dengan cara ini mempersiapkan landasan bagi artikel keempat yang akan berfokus lebih khusus pada hukum dan kecerdasan buatan.

1.4 Peta jalan

Sisa artikel ini tersusun dalam enam langkah. Bagian 2 merekonstruksi model-model dominan tentang nalar publik dan agama dalam teori politik kontemporer, dengan menyoroti liberalisme politik Rawlsian, teori diskursus Habermasian, dan konfigurasi praktis netralitas liberal serta sekularisme prosedural. Bagian 3 mengembangkan penilaian kritis atas model-model ini

dengan menggunakan aksioma-aksioma martabat minimal dan memperkenalkan tipe-tipe ideal sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan. Bagian 4 memperkenalkan gagasan tata kelola kebenaran demokratis dan secara terfokus mengingatkan kembali posisi Sabda di dalam The Cohesive Tetrad. Bagian 5 menerjemahkan arsitektur ini ke dalam sebuah rancangan baru tentang nalar publik sebagai praktik multi-register. Bagian 6 menerapkan arsitektur ini pada kasus-kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola kecerdasan buatan. Bagian 7 menutup dengan menguraikan implikasi teoretis dan praktis serta menempatkan argumen ini dalam rangkaian yang lebih luas tentang The Cohesive Tetrad.

2. Model-model dominan nalar publik dan agama

Bagian ini merekonstruksi tiga cara berpikir berpengaruh tentang nalar publik dan agama dalam teori politik kontemporer. Tujuannya bukan untuk menolaknya secara polemis, melainkan untuk memahami apa yang berusaha mereka lindungi dan mengapa pendekatan-pendekatan ini menjadi menarik dalam demokrasi-demokrasi majemuk *(Rawls 1993; Habermas 1996; Larmore 1996; Quong 2011)*. Hanya setelah rekonstruksi simpatik ini artikel akan menundukkan mereka pada uji yang diajukan oleh aksioma-aksioma martabat minimal dan peran Sabda.

Tiga konfigurasi yang dibahas di sini adalah: nalar publik Rawlsian dalam liberalisme politik, teori diskursus Habermasian dalam kunci pasca-sekuler, dan pola yang lebih longgar namun kuat dari netralitas liberal dan sekularisme prosedural yang membentuk banyak praktik demokratis. Ketiganya berupaya menjaga kebebasan dan kesetaraan di bawah kondisi pluralisme mendalam. Ketiganya juga berbagi keberatan untuk mengizinkan Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, tampil sebagai Sabda dalam struktur pembenaran hukum dan kebijakan.

2.1 Nalar publik Rawlsian: liberalisme politik dan the proviso

Liberalisme politik John Rawls merupakan salah satu upaya paling berpengaruh untuk menggambarkan bagaimana sebuah masyarakat demokratis dapat tetap stabil dan adil dari waktu ke waktu di bawah kondisi pluralisme yang wajar *(Rawls 1993)*. Rawls berangkat dari fakta bahwa warga dalam demokrasi modern menganut beragam doktrin komprehensif. Ia berargumen bahwa akan bersifat tidak adil sekaligus tidak bijaksana jika negara mendasarkan prinsip-prinsip fundamentalnya pada kebenaran satu doktrin semacam itu. Sebagai gantinya, ia mengusulkan suatu konsepsi politik keadilan yang berdiri sendiri, yang dirumuskan dalam istilah politik alih-alih metafisik.

Dalam kerangka ini, Rawls memperkenalkan gagasan nalar publik. Nalar publik adalah jenis penalaran yang layak digunakan ketika warga dan pejabat membenarkan posisi mereka terkait pokok-pokok konstitusional dan persoalan-persoalan mendasar mengenai keadilan *(Rawls 1993, 1997)*. Dalam konteks semacam ini, warga memiliki kewajiban kesantunan sipil. Kewajiban ini menuntut mereka untuk saling menawarkan alasan yang bersandar pada nilai-nilai politik yang dapat diterima warga lain yang wajar, meskipun mereka berbeda dalam doktrin komprehensif. Alasan-alasan religius tidak sepenuhnya dikeluarkan dari diskusi politik, tetapi tunduk pada sebuah *proviso*. Warga yang menginvokasi alasan-alasan semacam itu harus, pada waktunya, juga bersedia menopang posisi politik yang sama dengan alasan-alasan publik yang tidak mengandaikan doktrin komprehensif mana pun *(Rawls 1997; Audi and Wolterstorff 1997)*.

Dari perspektif The Cohesive Tetrad, banyak yang patut diapresiasi dalam arsitektur Rawlsian ini. Ia menanggapi dengan serius bahaya mayoritarianisme religius dan pengesahan klaim kebenaran religius oleh negara, serta berupaya melindungi minoritas dari pemaksaan *(Larmore 1996; Forst 2012)*. Pada saat yang sama, arsitektur ini memiliki implikasi yang jelas. Sekalipun warga secara pribadi boleh dimotivasi oleh Sabda, bahasa pembenaran resmi dalam hukum dan kebijakan harus menjadi independen dari Sabda ketika berbicara kepada komunitas sebagai keseluruhan. Sabda, paling jauh, berperan sebagai motivasi latar, bukan bagian dari struktur publik yang menjelaskan mengapa klaim-klaim tertentu tentang martabat manusia dan telos memiliki kewibawaan atas semua orang *(Mutaqin 2025b)*.

2.2 Teori diskursus Habermasian: pembelajaran pasca-sekuler dan penerjemahan

Jürgen Habermas berbagi keprihatinan Rawls tentang legitimasi di bawah kondisi pluralisme, tetapi teori diskursusnya mengembangkan jalur yang berbeda. Bagi Habermas, legitimasi hukum dalam demokrasi konstitusional muncul dari prosedur di mana mereka yang terdampak oleh norma-norma hukum dapat berpartisipasi sebagai yang setara dalam per deliberasian rasional *(Habermas 1996)*. Hukum berfungsi sebagai medium yang menerjemahkan daya komunikatif, yang dihasilkan dalam perdebatan publik, ke dalam daya administratif.

Dalam tulisan-tulisan kemudian tentang masyarakat pasca-sekuler, Habermas secara lebih eksplisit mengakui bahwa agama tetap menjadi sumber penting bagi wawasan dan motivasi moral. Ia berargumen bahwa masyarakat yang sekuler secara refleksif tidak semestinya memperlakukan kontribusi religius sekadar sebagai sisa-sisa tahap terdahulu, melainkan sebagai pembawa kebenaran yang mungkin *(Habermas 2006, 2008)*. Hal ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, warga sekuler memiliki kewajiban keterbukaan; mereka hendaknya bersedia mendengarkan argumen religius dalam bahasanya sendiri dan ikut serta dalam upaya penerjemahan yang bersifat kooperatif. Kedua, Habermas membedakan antara ruang publik informal dan institusi formal. Dalam masyarakat sipil, warga bebas menggunakan bahasa religius, termasuk rujukan eksplisit pada kitab suci dan pewahyuan. Namun di parlemen, pengadilan, dan lembaga administratif, bahasa yang diperhitungkan dalam pembenaran hukum haruslah sekuler *(Habermas 1996, 2006)*.

Dari sudut pandang The Cohesive Tetrad, ini merupakan kemajuan penting dibandingkan sekularisme kaku. Habermas mengakui status epistemik tradisi-tradisi religius dan memperlakukan tradisi-tradisi tersebut sebagai mitra dalam pembelajaran timbal balik *(Casanova 1994; Taylor 2007)*. Namun peran struktural yang diberikan kepada alasan-alasan religius tetap terbatas. Hanya residu religius yang telah diterjemahkan secara sekuler yang dapat memasuki pembenaran final atas hukum. Otoritas Sabda sebagai Sabda, yakni sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, tidak diakui pada titik ketika norma-norma hukum diadopsi dan ditegakkan *(Habermas 2006; Forst 2012; Mutaqin 2025b)*.

2.3 Netralitas liberal dan sekularisme prosedural dalam praktik

Di samping teori-teori eksplisit tersebut, banyak demokrasi beroperasi dengan seperangkat gagasan yang lebih menyebar yang sering disebut sebagai netralitas liberal dan sekularisme prosedural. Di sini penekanan kurang diberikan pada uraian filosofis yang sistematis dan lebih pada pengaturan institusional serta budaya politik *(Larmore 1996; Quong 2011)*. Ideal netralitas menyatakan bahwa negara tidak seharusnya mengadopsi doktrin komprehensif apa pun sebagai pandangan resmi tentang dunia. Sekularisme prosedural menerjemahkan ideal ini

ke dalam praktik-praktik konkret yang memisahkan lembaga-lembaga keagamaan dari negara dan mendorong penggunaan alasan-alasan yang dianggap umum, rasional, atau ilmiah dalam hukum dan kebijakan *(Casanova 1994; Taylor 2007)*.

Namun, seiring waktu, sebuah pergeseran kerap terjadi. Dalam ketiadaan artikulasi bersama tentang norma dan telos yang ultimat, penalaran publik dan perancangan kebijakan cenderung semakin bergantung pada rasionalitas teknokratis dan ekonomis *(Forst 2012; Galeotti 2015)*. Keputusan-keputusan dibingkai dalam istilah efisiensi, efektivitas biaya, dan stabilitas sistem. Martabat manusia dan telos terus disebut, tetapi kriteria operasional untuk memilih di antara opsi-opsi terutama disediakan oleh model-model risiko, utilitas, dan pemeliharaan sistem. Hasilnya adalah konfigurasi yang kelak dalam artikel ini dinamai sekularisme kosong *(Taylor 2007; Mutaqin 2025b)*.

2.4 Penilaian awal dari cakrawala martabat dan telos

Penilaian yang adil atas model-model ini harus dimulai dengan mengakui capaian-capaian mereka *(Rawls 1993; Habermas 1996; Larmore 1996; Quong 2011)*. Model-model tersebut berupaya mencegah peleburan kekuasaan negara dengan satu doktrin religius atau anti-religius mana pun dan melindungi minoritas serta kebebasan nurani. Namun ketika dilihat dari cakrawala martabat dan telos, sebagaimana dijernihkan dalam karya sebelumnya, sebuah keterbatasan bersama menjadi tampak *(Waldron 2012; Nussbaum 2006)*. Ketiga konfigurasi tersebut berusaha memegang bersama dua komitmen. Di satu sisi, mereka ingin menegaskan bahasa yang kuat tentang martabat manusia dan nilai moral yang setara. Di sisi lain, mereka enggan mengakui Sabda, atau sumber pewahyuan analog, sebagai otoritas publik terkait norma dan telos.

Aksioma-aksioma martabat minimal yang dikembangkan dalam karya sebelumnya mempertajam ketegangan ini *(Mutaqin 2025b; Sangiovanni 2017)*. Jika kita mengklaim bahwa setiap manusia memiliki martabat melekat yang tidak dapat direduksi menjadi fungsi, bahwa martabat ini setara, bahwa tidak seorang pun boleh direduksi menjadi instrumen semata, bahwa keseluruhan spektrum kerentanan termasuk dalam lingkup kepedulian, dan bahwa institusi harus bertanggung jawab terhadap jejak historisnya sendiri, maka kita berutang sebuah penjelasan tentang apa itu manusia dan mengapa harkat mereka memiliki struktur seperti itu. Kapasitas, evolusi, dan kontrak, diambil sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak dapat sepenuhnya menjawab tuntutan tersebut. Sabda diperkenalkan sebagai cakrawala yang niscaya. Jika ini benar, maka model-model nalar publik yang menolak mengizinkan Sabda tampil dalam struktur pembenaran hukum dan kebijakan menghadapi sebuah pilihan. Entah mereka mengendurkan isi pembicaraan tentang martabat sehingga tidak lagi memikul seluruh bobot aksioma-aksioma tersebut, atau mereka diam-diam bergantung pada sumber norma dan telos yang enggan mereka sebutkan *(Taylor 2007; Forst 2012; Mutaqin 2025b)*. Inilah yang menyiapkan panggung bagi analisis atas sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan.

3. Dua kegagalan: sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan

Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa model-model dominan nalar publik berupaya menstabilkan demokrasi di bawah pluralisme mendalam dengan menjaga Sabda tetap berjarak dari struktur pembenaran hukum dan kebijakan *(Taylor 2007; Forst 2012; Casanova 1994)*. Mereka melakukan itu dengan alasan yang tidak sepele. Namun begitu aksioma-aksioma martabat minimal dan peran Sabda ditanggapi dengan serius, model-model ini menghadapi

ketegangan internal. Di bawah tekanan tersebut, praktik-praktik demokratis cenderung bergeser menuju dua konfigurasi yang cacat: sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan.

3.1 Sekularisme kosong: ketika prosedur bertahan dan telos menguap

Sekularisme kosong tidak identik dengan pemisahan prinsipil antara lembaga-lembaga keagamaan dan negara. Sekularisme kosong adalah sebuah kondisi struktural di mana cakrawala norma dan telos yang menopang pembenaran publik tidak lagi diartikulasikan, sekalipun bahasa martabat manusia dan hak-hak tetap digunakan *(Taylor 2007)*. Pergeseran menuju sekularisme kosong dapat dimulai dari komitmen-komitmen yang wajar terhadap netralitas dan keteraksesan alasan, tetapi secara bertahap mengikis pengakuan publik atas sumber berwibawa mana pun bagi norma dan telos, termasuk Sabda *(Larmore 1996; Quong 2011; Forst 2012; Galeotti 2015)*.

Ketika kita menguji konfigurasi ini terhadap aksioma-aksioma martabat minimal, kekurangannya menjadi tampak. Aksioma 1 dan Aksioma 2 dikompromikan ketika pribadi-pribadi dinilai terutama dalam istilah produktivitas, potensi penghasilan, atau profil risiko, sehingga merongrong martabat yang melekat dan setara *(Nussbaum 2006; Waldron 2012; Fineman 2008)*. Aksioma 3 terancam ketika manusia diperlakukan sebagai variabel dalam persoalan optimasi, terutama di bawah rezim tata kelola berbasis data *(Meilaender 2009; Jonas 1984)*. Aksioma 4 melemah ketika mereka yang berada di tepi kehidupan atau yang memiliki kebutuhan mahal secara sistematis dirugikan *(Fineman 2008)*. Aksioma 5 dilemahkan oleh cakrawala waktu yang pendek dan rasa puas diri prosedural yang mengabaikan jejak historis eksklusi dan penghinaan *(Jonas 1984; Forst 2012)*. Dari sudut pandang The Cohesive Tetrad, sekularisme kosong dapat digambarkan sebagai konfigurasi di mana Logika dan fragmen-fragmen Qualia digunakan tanpa diankrakan pada Sabda, Mistika, Akhlak, atau Intention–Trace Alignment *(Mutaqin 2025a, 2025b)*.

3.2 Teokrasi penuh ketakutan: ketika satu tafsir atas Sabda membekukan sirkuit

Teokrasi penuh ketakutan adalah bayangan cermin dari sekularisme kosong. Ia muncul ketika komunitas-komunitas yang mengalami luka akibat normativitas kosong merespons dengan berupaya memasang kembali Sabda di pusat kekuasaan politik, namun melakukannya dengan cara yang menyamakan Sabda dengan satu tafsir historis tertentu dan melindungi tafsir tersebut dari koreksi *(Casanova 1994; Taylor 2007; MacIntyre 1981)*. Sebuah monopoli atas penafsiran ditegaskan, deliberasi politik direduksi menjadi penalaran satu-arah berbasis Sabda, perbedaan pendapat didelegitimasi, dan Sabda berada dalam risiko diinstrumentalisasi bagi proyek-proyek identitas dan kendali.

Ketika diuji dengan aksioma-aksioma martabat, teokrasi penuh ketakutan juga gagal. Aksioma 1 dan Aksioma 2 dilanggar ketika para pihak yang berbeda pendapat atau minoritas diperlakukan bukan sebagai partisipan penuh dalam kehidupan publik, sekalipun status formal mereka sebagai warga tetap utuh *(Nussbaum 2006; Kittay 1999)*. Aksioma 3 terancam ketika hidup dan tubuh diperlakukan sebagai bahan mentah bagi proyek-proyek pemurnian religius atau pemulihan kultural *(Fineman 2008; Meilaender 2009)*. Aksioma 4 menderita ketika mereka yang paling rentan berasal dari kelompok yang sudah termarjinalkan, yang penderitaannya dirasionalisasi sebagai biaya yang perlu untuk mempertahankan kemurnian atau ketertiban *(Fineman 2008)*. Aksioma 5 dirongrong ketika institusi menampilkan diri sebagai perwujudan setia Sabda secara definisional, sehingga kritik atas rekam jejak historis

mereka dialihkan menjadi seolah-olah serangan terhadap yang sakral *(Jonas 1984; Forst 2012)*. Dilihat melalui The Cohesive Tetrad, teokrasi penuh ketakutan adalah konfigurasi di mana Sabda ditegaskan tanpa mengizinkan Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment melakukan kerja sewajarnya untuk menguji dan memurnikan klaim-klaim yang diajukan atas nama Sabda *(Mutaqin 2025a, 2025b; MacIntyre 1981)*.

3.3 Koneksi struktural dan pencarian konfigurasi ketiga

Sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan dapat tampak sebagai kebalikan satu sama lain. Namun pada tingkat struktural, keduanya saling terhubung. Keduanya muncul dari salah-penempatan Sabda di dalam arsitektur tata kelola kebenaran *(Taylor 2007; Forst 2012)*. Sekularisme kosong salah-menempatkan Sabda dengan mengusirnya dari struktur pembenaran publik. Teokrasi penuh ketakutan salah-menempatkan Sabda dengan meruntuhkannya ke dalam satu tafsir yang ditempatkan di luar jangkauan koreksi. Dalam kedua kasus, relasi antara Sabda dan register-register lain dalam The Cohesive Tetrad menjadi terdistorsi *(Galeotti 2015; Sangiovanni 2017)*.

Jika analisis karya-karya sebelumnya diterima, demokrasi-demokrasi yang ingin mempertahankan klaim-klaim kuat tentang martabat manusia dan telos tidak dapat bertahan tanpa batas dalam salah satu konfigurasi ini *(Mutaqin 2025b)*. Mereka menghadapi sebuah trilema. Mereka dapat melemahkan wacana martabat sehingga tidak lagi menyatakan lebih dari yang dapat dijustifikasi oleh fondasi-fondasi sekuler mereka. Mereka dapat tergelincir ke, atau memeluk, teokrasi penuh ketakutan. Atau mereka dapat mencari sebuah konfigurasi ketiga di mana Sabda diakui secara publik sebagai cakrawala norma dan telos, sementara keseluruhan arsitektur The Cohesive Tetrad menstrukturkan cara klaim-klaim atas kebenaran, termasuk yang berakar pada Sabda, bergerak melalui institusi-institusi demokratis.

4. Sabda dan arsitektur tata kelola kebenaran demokratis

Analisis sejauh ini telah menunjukkan bahwa model-model dominan nalar publik entah mengosongkan cakrawala publik tentang norma dan telos atau justru mengundang upaya reaktif untuk mentakhtakan satu tafsir atas Sabda sebagai otoritas politik yang tak dapat digugat *(Mutaqin 2025b)*. Jika aksioma-aksioma martabat minimal dan argumen-argumen sebelumnya tentang Sabda ditanggapi dengan serius, kedua keluaran ini tidak dapat diterima. Kita memerlukan sebuah konfigurasi di mana Sabda dapat memainkan peran normatifnya tanpa menghancurkan kebebasan demokratis, pluralisme, dan akuntabilitas institusional.

4.1 Posisi Sabda di dalam The Cohesive Tetrad

The Cohesive Tetrad adalah sebuah arsitektur enam register bagi tata kelola kebenaran. Arsitektur ini terdiri dari Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment *(Mutaqin 2025a, 2025b)*. Sabda dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Logika merujuk pada praktik-praktik terdisiplin dalam melakukan inferensi dan pemeriksaan konsistensi. Qualia menamai pengalaman hidup di bawah rezim hukum, kebijakan, dan teknologi. Mistika adalah *Mistika, the intentional–spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*. Akhlak berkaitan dengan karakter moral yang dapat diamati. Intention–Trace Alignment berkaitan dengan derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak moral epistemik lintas waktu.

Di dalam arsitektur ini, Sabda menempati posisi sebagai otoritas penetap cakrawala. Register-register lain tidak bersaing dengan Sabda pada tingkat yang sama. Register-register tersebut bertindak sebagai kanal yang harus dilalui klaim-klaim yang berakar pada Sabda maupun klaim-klaim yang berakar pada keahlian sekuler agar dapat dipandang dapat dipercaya dalam kehidupan publik *(Mutaqin 2025a, 2025b)*. Menjaga Sabda dan register-register lainnya tetap terkait secara terdisiplin bersifat esensial untuk menahan baik sekularisme kosong maupun teokrasi penuh ketakutan.

4.2 Mendefinisikan tata kelola kebenaran demokratis

Tata kelola kebenaran demokratis, sebagaimana digunakan dalam artikel ini, tidak berarti bahwa pemerintah memiliki kebenaran dalam pengertian kepemilikan eksklusif. Istilah ini merujuk pada struktur dan praktik melalui mana klaim-klaim atas kebenaran, khususnya dalam urusan norma dan telos, dibawa ke dalam institusi demokratis, diuji, dan dikenai koreksi dari waktu ke waktu *(Forst 2012; Sangiovanni 2017)*. Empat kondisi mendefinisikan tata kelola kebenaran demokratis dalam masyarakat majemuk: keterbukaan sumber, perlindungan martabat dan kebebasan nurani, mekanisme koreksi internal, dan integrasi berbagai register. Kondisi-kondisi ini menggaungkan sekaligus memperdalam aksioma-aksioma martabat *(Waldron 2012; Nussbaum 2006)* dan hak atas pembenaran dalam teori politik kontemporer *(Forst 2012)*.

Dengan definisi ini, The Cohesive Tetrad merupakan sebuah kandidat arsitektur bagi tata kelola kebenaran demokratis. Arsitektur ini tidak meresepkan satu bentuk konstitusional tertentu. Ia menetapkan pola-pola normatif dan epistemik yang harus ditampilkan setiap tatanan demokratis jika ingin memperlakukan martabat dan telos secara berintegritas *(Mutaqin 2025a, 2025b)*.

4.3 Peran normatif Sabda dalam demokrasi

Di dalam arsitektur ini, Sabda memainkan empat peran normatif yang tidak dapat sepenuhnya diambil alih oleh sumber-sumber lain. Pertama, Sabda mendasari martabat melekat dan setara dengan menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan, disapa, dan dinilai dengan cara yang tidak bergantung pada kapasitas, status, atau kontribusi *(Waldron 2012; Nussbaum 2006; Sangiovanni 2017)*. Kedua, Sabda menetapkan non-instrumentalisasi sebagai batas yang mengikat dengan berbicara tentang manusia sebagai pemikul panggilan atau telos yang tidak dapat ditundukkan pada kalkulus instrumental semata *(Jonas 1984; Meilaender 2009)*. Ketiga, Sabda mengintegrasikan seluruh spektrum kerentanan ke dalam cakrawala kepedulian dengan menyapa yang lemah dan yang tersisih dengan cara yang menolak eksklusi mereka *(Kittay 1999; Fineman 2008; Nussbaum 2006)*. Keempat, Sabda menyediakan norma untuk mengevaluasi jejak historis institusi dengan menamai bentuk-bentuk penindasan dan memanggil pertobatan *(Jonas 1984; Forst 2012)*.

Tidak satu pun dari peran-peran ini dapat diisi secara memadai hanya dengan merujuk pada kapasitas, evolusi, atau kontrak-kontrak yang saling menguntungkan. Rujukan-rujukan tersebut mungkin menyumbang wawasan parsial. Namun rujukan itu tidak cukup untuk menstabilkan klaim-klaim kuat tentang martabat yang diajukan demokrasi dalam konstitusi dan putusan pengadilan mereka. Sabda diperlukan agar klaim-klaim tersebut menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar retorika yang diwarisi *(Mutaqin 2025b)*.

4.4 Prioritas epistemik Sabda atas logika dan data

Mengakui peran normatif Sabda dalam demokrasi menimbulkan sebuah pertanyaan yang peka. Dalam pengertian apa kita dapat berbicara tentang prioritas Sabda atas logika dan data tanpa menyangkal legitimasi penyelidikan rasional dan bukti empiris. Artikel ini menjawabnya dengan membedakan tingkatan otoritas. Sabda memiliki prioritas pada tingkat norma dan telos, dengan menetapkan batas dan arah di dalamnya logika dan data beroperasi *(Mutaqin 2025b; Jonas 1984)*. Logika dan data memiliki otoritas instrumental, bukan otoritas final, dalam urusan norma dan telos *(Forst 2012; Floridi and Cowls 2019)*. Ketika muncul konflik antara sesuatu yang secara teknis tampak paling optimal dan sesuatu yang oleh Sabda dinyatakan tidak selaras dengan martabat manusia, Sabda memiliki prioritas pre-emptive *(Jonas 1984; MacIntyre 1981)*. Pola ini menahan sekularisme kosong dengan menolak menjadikan logika dan data sebagai sumber senyap bagi norma dan telos, dan menahan teokrasi penuh ketakutan dengan menegaskan bahwa klaim-klaim tentang apa yang dituntut Sabda harus senantiasa diperiksa dalam terang logika dan pengetahuan empiris.

4.5 Mengintegrasikan Sabda ke dalam proses demokratis melalui Tetrad

Dengan pembedaan-pembedaan ini dalam pandangan, kita dapat menjelaskan secara lebih konkret bagaimana Sabda dan register-register lain dalam The Cohesive Tetrad dapat menstrukturkan pengambilan keputusan demokratis. Artikel ini menyajikan sebuah urutan skematis: perumusan klaim-klaim publik, pengujian logis dan konseptual, konfrontasi dengan pengalaman hidup, pemeriksaan orientasi intensional, evaluasi karakter moral dan pola-pola institusional, serta audit jangka panjang atas niat dan jejak *(Rawls 1993; Habermas 1996; Forst 2012; Kittay 1999; Fineman 2008; MacIntyre 1981; Nussbaum 2006; Jonas 1984; Mutaqin 2025b)*. Dalam urutan ini, Sabda diintegrasikan ke dalam proses demokratis bukan sebagai latar privat yang opsional dan bukan sebagai kartu truf yang mengakhiri diskusi. Sabda berfungsi sebagai cakrawala norma dan telos di dalam arsitektur multi-register yang menuntut kejernihan logis, kepekaan terhadap pengalaman, pemeriksaan niat, pembinaan Akhlak, dan akuntabilitas jangka panjang.

5. The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur nalar publik

Jika tata kelola kebenaran demokratis menamai cara klaim-klaim atas norma dan telos seharusnya bergerak melalui institusi, nalar publik menamai cara warga dan pejabat seharusnya berbicara satu sama lain ketika mereka membenarkan hukum-hukum koersif. Bagian-bagian sebelumnya telah berargumen bahwa model-model dominan nalar publik bersifat tidak stabil secara struktural begitu aksioma-aksioma martabat dan kebutuhan akan Sabda sebagai cakrawala ditanggapi dengan serius *(Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Taylor 2007; Forst 2012; Galeotti 2015)*. Bagian ini mengajukan sebuah alternatif. Bagian ini mengembangkan The Cohesive Tetrad bukan hanya sebagai kerangka bagi tata kelola kebenaran, tetapi sebagai arsitektur nalar publik yang sesuai bagi demokrasi majemuk.

5.1 Dari satu register ke nalar publik multi-register

Ideal-ideal nalar publik satu-register muncul sebagai respons terhadap bahaya-bahaya yang nyata: risiko bahwa warga membenarkan hukum dengan menginvokasi kebenaran doktrin komprehensif mereka sendiri, sehingga menempatkan yang lain dalam posisi inferior

permanen *(Rawls 1993, 1997; Habermas 1996)*. Model-model ini meminta warga untuk menawarkan alasan-alasan publik yang dirumuskan dalam kosakata yang tidak mengandaikan penerimaan atas pandangan tertentu tentang Tuhan, pewahyuan, atau metafisika, yang sering dirumuskan sebagai nilai-nilai politik atau prinsip-prinsip konstitusional *(Audi and Wolterstorff 1997; Larmore 1996; Quong 2011)*. Namun, begitu kekuatan bahasa martabat dalam praktik konstitusional diakui, model-model satu-register entah mengikis kosakata bersama sedemikian rupa sehingga tidak lagi memikul klaim-klaim kuat, atau mereka secara implisit bergantung pada sumber-sumber norma dan telos yang tidak diakui. Dalam praktik, hal ini sering kali menghasilkan sekularisme kosong yang telah dijelaskan sebelumnya *(Taylor 2007; Forst 2012; Galeotti 2015)*.

Alternatif yang diajukan di sini adalah memperlakukan nalar publik sebagai praktik multi-register yang distrukturkan oleh The Cohesive Tetrad. Nalar publik didefinisikan sebagai praktik di mana warga dan institusi dalam suatu demokrasi membawa klaim-klaim tentang hukum dan kebijakan koersif ke dalam disiplin bersama Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment, untuk sampai pada keputusan-keputusan yang dapat dibenarkan kepada semua pihak sebagai konsisten dengan martabat manusia dan telos di tengah perbedaan mendalam *(Mutaqin 2025b; Forst 2012; Fraser 1990, 2008)*. Argumen-argumen berbasis Sabda tidak diwajibkan menghilang dari wacana publik *(Casanova 1994; Taylor 2007)*. Argumen moral sekuler dan wawasan ilmiah tidak diturunkan derajatnya *(Forst 2012; Sangiovanni 2017)*. Keteraksesan dicapai pada tingkat proses, bukan melalui homogenitas linguistik *(Fraser 1990, 2008; Galeotti 2015)*.

5.2 Kondisi-kondisi normatif bagi kehadiran publik Sabda

Jika Sabda hendak diakui secara publik sebagai cakrawala norma dan telos, sejumlah kondisi harus dipenuhi untuk mencegah kemerosotan ke dalam teokrasi penuh ketakutan. Artikel ini merumuskan empat kondisi semacam itu: universalitas pihak yang disapa, tidak adanya pemaksaan terhadap nurani, penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan terhadap perbedaan pendapat. Universalitas pihak yang disapa menuntut agar Sabda, sebagaimana diinvokasi dalam ruang publik, dipahami sebagai berbicara tentang martabat dan telos semua manusia, bukan hanya penganut satu komunitas tertentu *(Nussbaum 2006; Waldron 2012; Sangiovanni 2017)*. Tidak adanya pemaksaan terhadap nurani menegaskan kembali wawasan liberal bahwa negara tidak boleh memaksa keyakinan, bahkan ketika norma-norma dibenarkan dengan merujuk pada Sabda *(Audi and Wolterstorff 1997; Forst 2012)*. Penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan menuntut agar klaim-klaim tentang apa yang dituntut Sabda terbuka terhadap penelaahan oleh Logika, Qualia, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment *(Forst 2012; MacIntyre 1981; Mutaqin 2025b)*. Perlindungan terhadap perbedaan pendapat menjaga status warga yang berbeda pendapat dan para kritikus internal sebagai pemikul martabat sepenuhnya, serta mengakui perbedaan pendapat sebagai pembawa Qualia dan pemicu bagi audit keselarasan *(Fraser 1990, 2008; Galeotti 2015)*.

5.3 Peran institusional dari enam register

Agar The Cohesive Tetrad dapat berfungsi sebagai arsitektur nalar publik, register-registernya harus menemukan ekspresi konkret dalam institusi. Dalam lembaga legislatif, hal ini mengimplikasikan bahwa argumen-argumen yang diinformasikan oleh Sabda dapat muncul secara eksplisit, bahwa penelaahan logis atas pembenaran menjadi bagian praktik yang diakui, bahwa perhatian yang terstruktur terhadap Qualia dilembagakan, dan bahwa lembaga legislatif

berkomitmen pada evaluasi berkala atas dampak jangka panjang hukum, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan *(Casanova 1994; Taylor 2007; Rawls 1993; Forst 2012; Kittay 1999; Fineman 2008; Jonas 1984; Mutaqin 2025b)*. Dalam pengadilan, hal ini berarti bahwa cakrawala Sabda dan martabat yang membentuk komitmen konstitusional diakui tanpa menjadikan para hakim sebagai teolog, bahwa konsistensi logis dan doktrinal menjadi pusat, bahwa masukan pengalaman dari pihak-pihak berperkara dan *amici curiae* diambil dengan serius, dan bahwa pengadilan tetap bersedia meninjau kembali preseden yang jejak historisnya telah menjadi tidak adil *(Habermas 1996; Waldron 2012; Nussbaum 2006; Kittay 1999; Fineman 2008; MacIntyre 1981; Jonas 1984; Mutaqin 2025b)*.

Dalam lembaga eksekutif dan praktik birokratis, The Cohesive Tetrad membimbing baik perancangan kebijakan maupun implementasinya. Sabda dan aksioma-aksioma martabat membentuk cakrawala, sementara logika dan data digunakan untuk memahami relasi kausal dan mengantisipasi dampak tak terduga, dan Qualia diakses melalui proses-proses partisipatif *(Nussbaum 2006; Fineman 2008; Forst 2012)*. Implementasi dibentuk oleh Mistika dalam pengertian akuntabilitas terhadap cakrawala transenden, oleh Akhlak dalam kultur organisasi, dan oleh Intention–Trace Alignment melalui sistem pemantauan dan evaluasi yang melacak konsekuensi yang dialami, bukan hanya keluaran kuantitatif *(MacIntyre 1981; Jonas 1984)*.

Akhirnya, dalam badan-badan etik dan regulator yang menangani bioteknologi dan kecerdasan buatan, The Cohesive Tetrad menyediakan templat untuk mengevaluasi sistem-sistem baru yang berdaya besar. Sabda mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal tentang praktik-praktik yang mungkin secara inheren tidak selaras dengan martabat dan telos, sekalipun efisien *(Jonas 1984; O'Neil 2016; Eubanks 2018)*. Logika dan data digunakan untuk menelaah sifat-sifat teknis dan klaim-klaim tentang keamanan *(Cath 2018; Floridi and Cowls 2019)*. Qualia memastikan bahwa keputusan regulatif diinformasikan oleh pengalaman mereka yang paling terdampak *(Eubanks 2018; Fineman 2008)*. Mistika dan Akhlak menyinggung pembentukan moral para perancang, pelaksana, dan regulator *(MacIntyre 1981; Nussbaum 2006)*. Intention–Trace Alignment mengamanatkan audit berkelanjutan atas penerapan AI *(O'Neil 2016; Jonas 1984; Mutaqin 2025b)*.

6. Kasus-kasus stilistis: menerapkan arsitektur

Arsitektur yang diajukan sejauh ini masih berada pada tingkat abstraksi yang relatif tinggi. Untuk menguji koherensi dan daya pembedanya, arsitektur ini harus dibawa bersentuhan dengan situasi-situasi yang menyerupai jenis konflik yang benar-benar dihadapi demokrasi. Karena itu, artikel ini membahas tiga kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola digital.

6.1 Bioetika: kehidupan rapuh di ambang kematian

Kasus pertama menyangkut regulasi penghentian terapi penunjang hidup bagi pasien yang secara ireversibel tidak sadar, tanpa prospek pemulihan yang wajar, dan dengan kehendak awal yang ambigu. Di bawah sekularisme kosong, bahasa formal legislasi dan kebijakan bersifat sekuler dan tampak netral, dan komite etik membingkai persoalan dalam istilah efektivitas biaya dan *quality adjusted life years (Pellegrino 1999; Nussbaum 2006)*. Martabat disebutkan tetapi didefinisikan secara fungsional melalui proksi seperti kesadaran dan kapasitas untuk preferensi. Mereka yang tidak dapat berbicara untuk dirinya sendiri berisiko diperlakukan terutama sebagai pusat biaya.

Sebaliknya, di bawah teokrasi penuh ketakutan, sebuah pembacaan Sabda yang diotorisasi menyatakan bahwa penghentian terapi penunjang hidup dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan. Hukum mewajibkan kelanjutan semua intervensi sampai kematian biologis, tanpa memedulikan konteks, dan keluarga atau klinisi yang mempertanyakannya ditegur sebagai kurang iman *(Meilaender 2009; Jonas 1984)*. Sabda terus-menerus diinvokasi, tetapi Logika, Qualia, dan Akhlak dibungkam. Pasien dan keluarga berisiko menjadi instrumen dalam proyek mempertahankan suatu tafsir.

Di bawah tata kelola kebenaran demokratis yang dibentuk oleh The Cohesive Tetrad, Sabda berbicara secara publik tentang harga setiap kehidupan manusia dan menyatakan bahwa kehidupan tersebut tidak dapat dibuang, namun penafsiran atas Sabda dikenai analisis logis dan pengujian pengalaman *(Pellegrino 1999; Sulmasy 2002; Meilaender 2009; Kittay 1999; Fineman 2008; Mutaqin 2025b)*. Logika membedakan antara membunuh dan membiarkan mati, antara intervensi proporsional dan tidak proporsional. Qualia diakses melalui perjumpaan terstruktur dengan keluarga dan klinisi. Mistika dan Akhlak memeriksa motif dan kultur institusional. Intention–Trace Alignment mengikat polis untuk meninjau kembali regulasi dalam terang dampak historisnya. Hukum yang dihasilkan dapat melarang pengakhiran hidup secara aktif, menegaskan praduga kuat untuk perawatan dasar, dan mengizinkan penghentian intervensi yang sia-sia di bawah kriteria yang jelas. Hukum ini menghormati aksioma-aksioma martabat secara lebih setia dibanding alternatif-alternatifnya.

6.2 Kebijakan sosial: hidup yang mahal dan kesejahteraan warga difabel

Kasus kedua menyangkut dukungan jangka panjang bagi warga dengan disabilitas mendalam yang membutuhkan bantuan ekstensif dan kecil kemungkinannya memasuki pasar tenaga kerja. Di bawah sekularisme kosong, perdebatan dibingkai terutama dalam istilah keberlanjutan fiskal dan insentif. Warga difabel diakui sebagai pemikul hak, tetapi logika operasional menimbang biaya finansial dukungan komprehensif terhadap keuntungan kesejahteraan agregat *(Nussbaum 2006; Fineman 2008)*. Mereka yang kebutuhannya paling mahal dan kontribusinya paling kecil terhadap produktivitas terukur ditempatkan dalam posisi tersangka.

Di bawah teokrasi penuh ketakutan, warga difabel dapat digambarkan sebagai pemikul berkah khusus atau ujian bagi iman komunitas, namun struktur konkret dukungan negara tetap tipis. Keluarga-keluarga didorong untuk menerima beban mereka sebagai panggilan ilahi, sementara permohonan bantuan lebih lanjut berisiko distigmatisasi *(Kittay 1999; Meilaender 2009)*. Sabda digunakan untuk memberikan makna pada penderitaan, tetapi Logika, Qualia, dan Akhlak tidak cukup diaktifkan. Ketidakadilan struktural dispiritualkan.

Di bawah tata kelola kebenaran demokratis, Sabda membentuk cakrawala dengan berbicara tentang harga setara mereka yang lemah serta kewajiban untuk merawat mereka yang tidak dapat merawat dirinya sendiri *(Nussbaum 2006; Kittay 1999)*. Logika menelaah bagaimana desain yang berbeda mendistribusikan beban dan peluang, dengan bertumpu pada teori egalitarian *(Anderson 1999; Fraser 1990, 2008)*. Qualia dibawa ke pusat melalui proses partisipatif yang melibatkan warga difabel dan keluarga mereka sebagai ko-perancang sistem dukungan *(Kittay 1999; Fineman 2008)*. Mistika dan Akhlak menanyakan apa yang sesungguhnya dicari otoritas publik dalam perdebatan ini dan mengungkap godaan untuk mempertahankan kenyamanan sambil memelihara citra diri moral *(MacIntyre 1981)*. Intention–Trace Alignment menuntut agar program-program ditinjau dari waktu ke waktu untuk pola ketergantungan atau eksklusi yang tidak diinginkan *(Jonas 1984; Mutaqin 2025b)*.

Hasilnya adalah sebuah kebijakan sosial yang mengalokasikan sumber daya serius untuk memastikan bahwa bahkan warga dengan disabilitas mendalam dapat hidup dengan cara yang mengekspresikan telos mereka sebagai manusia.

6.3 Infrastruktur digital dan AI: mengskor, memilah, dan mengelola melalui data

Kasus ketiga menyangkut adopsi sistem kecerdasan buatan untuk tata kelola sosial, seperti sistem penskoran algoritmik untuk mengalokasikan manfaat kesejahteraan, memprediksi risiko kejahatan, atau memprioritaskan akses ke layanan publik. Di bawah sekularisme kosong, argumen untuk sistem semacam itu berfokus pada efisiensi, akurasi, dan pengurangan bias manusia *(O'Neil 2016; Eubanks 2018)*. Martabat manusia diinvokasi sebagai alasan untuk menghapus diskriminasi eksplisit, tetapi pertanyaan yang lebih dalam tentang apakah bentuk-bentuk klasifikasi otomatis tertentu selaras dengan perlakuan terhadap warga sebagai pemikul telos jarang diajukan. Mereka yang menempati posisi marjinal menjadi subjek pengawasan dan kendali yang diintensifkan, dipetakan melalui jejak data yang tidak mereka setujui untuk dihasilkan.

Di bawah teokrasi penuh ketakutan, Sabda diinvokasi untuk membenarkan sistem digital bagi pengawasan dan penegakan moral. Otoritas dapat mempresentasikan sistem penskoran sebagai alat untuk mengidentifikasi mereka yang menyimpang dari norma perilaku yang ditetapkan, termasuk norma religius, dan mengintegrasikan partisipasi dalam ibadah serta kepatuhan pada kode religius ke dalam skor komposit *(Jonas 1984; Taylor 2007)*. Pembedaan antara penghakiman ilahi dan pemantauan manusia menjadi kabur, dan pertanyaan logis atau empiris tentang dampak merugikan sistem disingkirkan.

Di dalam arsitektur berbasis Tetrad, perdebatan tentang AI bagi tata kelola sosial mengambil bentuk yang berbeda. Sabda mengajukan pertanyaan awal tentang ranah-ranah di mana penskoran algoritmik secara inheren tidak selaras dengan martabat dan telos manusia dan harus dilarang sejak awal *(Jonas 1984; Forst 2012)*. Logika dan data diaktifkan sepenuhnya tetapi diperlakukan sebagai instrumen, bukan otoritas final *(Cath 2018; Floridi and Cowls 2019)*. Qualia ditempatkan di garis depan melalui penilaian partisipatif atas komunitas yang kemungkinan akan menjadi target, yang pengalaman mereka dengan gelombang sebelumnya tata kelola berbasis data dianalisis sebagai bukti *(Eubanks 2018; Fineman 2008)*. Mistika dan Akhlak menyinggung pembentukan moral para perancang dan regulator, dengan menyoroti godaan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada mesin *(MacIntyre 1981; Nussbaum 2006)*. Intention–Trace Alignment mengamanatkan audit berkelanjutan atas penerapan, dengan kesediaan untuk membatasi atau merancang ulang sistem yang jejak historisnya mengungkap pola-pola baru diskriminasi atau eksklusi *(O'Neil 2016; Jonas 1984; Mutaqin 2025b)*.

6.4 Pelajaran dari kasus-kasus

Secara bersama-sama, kasus-kasus stilistis ini menunjukkan bahwa The Cohesive Tetrad bukan hanya menawarkan kosakata untuk mengkritik sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan. The Cohesive Tetrad menyediakan sebuah cara bernalar terstruktur yang mempertahankan capaian autentik nalar publik sekuler, menyimpan kedalaman normatif yang disuplai oleh Sabda, dan melengkapi institusi demokratis untuk menguji dan mengoreksi klaim-klaim sekuler maupun religius dengan membawa klaim-klaim tersebut ke dalam disiplin bersama Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment *(Mutaqin 2025b; Forst 2012; Nussbaum 2006; O'Neil 2016; Eubanks 2018)*.

7. Implikasi dan kesimpulan

Artikel ini menanyakan bagaimana Sabda, yang didefinisikan sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, dapat diintegrasikan ke dalam nalar publik demokratis di bawah kondisi pluralisme mendalam. Artikel ini berargumen bahwa model-model dominan nalar publik, sekalipun didorong oleh keprihatinan yang sah, bersifat tidak stabil secara struktural begitu kita secara serius menanggapi baik klaim-klaim kuat tentang martabat manusia maupun peran Sabda dalam mendasari klaim-klaim tersebut *(Mutaqin 2025a, 2025b; Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Larmore 1996; Quong 2011)*. Artikel ini mengajukan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur bagi tata kelola kebenaran demokratis dan nalar publik serta menguji arsitektur tersebut melalui kasus-kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola AI.

Secara teoretis, usulan ini menantang asumsi bahwa penghormatan terhadap pluralisme niscaya menuntut privatisasi Sabda *(Taylor 2007; Casanova 1994; Mutaqin 2025b)*. Jika aksioma-aksioma martabat itu benar, maka upaya mempertahankan klaim-klaim kuat tentang martabat sambil mengecualikan Sabda dari pembenaran publik bersifat tidak stabil. Usulan ini membingkai ulang nalar publik sebagai sebuah proses alih-alih satu bahasa tunggal, dengan menyiratkan bahwa keteraksesan dan resiprositas diamankan dengan mengekspos alasan-alasan pada register-register pemeriksaan bersama, bukan dengan memaksa alasan-alasan itu masuk ke dalam idiom yang diklaim netral *(Forst 2012; Fraser 1990, 2008)*. Usulan ini juga memperjelas bahwa bahaya agama politis tidak melekat secara intrinsik pada kehadiran publik Sabda, melainkan pada cara-cara tertentu salah-menempatkan Sabda di dalam arsitektur tata kelola kebenaran *(Jonas 1984; MacIntyre 1981; Galeotti 2015)*.

Secara praktis, arsitektur Tetrad mengundang peninjauan kembali desain institusional. Lembaga legislatif dapat merevisi prosedur untuk memberikan tempat yang lebih terstruktur bagi kesaksian pengalaman dari kelompok-kelompok rentan, bagi audit jangka panjang atas konsekuensi legislasi, dan bagi refleksi eksplisit tentang karakter moral institusi pelaksana *(Waldron 2012; Nussbaum 2006; Fineman 2008; Forst 2012)*. Pengadilan dapat memperdalam keterlibatan dengan sumber-sumber historis yang membentuk komitmen konstitusional terhadap martabat, sambil tetap berhati-hati untuk tidak menampilkan diri sebagai penentu kebenaran teologis. Lembaga eksekutif dapat mengintegrasikan proses-proses partisipatif dan pembentukan karakter ke dalam pelatihan aparatur sipil negara. Badan etik dan regulator di bidang bioteknologi dan kecerdasan buatan dapat mengadopsi kerangka evaluasi yang secara eksplisit melacak keenam register dan menolak memperlakukan keberhasilan teknis atau efisiensi sebagai pembenaran yang memadai *(O'Neil 2016; Eubanks 2018; Cath 2018; Floridi and Cowls 2019)*. Pada tingkat penelitian, kerja lanjutan dapat mengembangkan studi kasus, mengeksplorasi bagaimana tradisi-tradisi religius yang berbeda merumuskan pengertian sepadan dengan Sabda, dan merinci indikator untuk menilai Intention–Trace Alignment dalam konteks institusional yang kompleks *(Forst 2012; Sangiovanni 2017; Mutaqin 2025b)*.

Di dalam rangkaian kerja yang lebih luas tentang The Cohesive Tetrad, artikel ini menempati posisi antara. Artikel pertama berargumen bahwa logika murni tidak dapat menjadi otoritas tertinggi dalam tata kelola kebenaran. Artikel kedua berargumen bahwa klaim-klaim kuat tentang martabat manusia dan telos memerlukan Sabda, yang terbenam di dalam The Cohesive Tetrad, agar dapat dimengerti *(Mutaqin 2025a, 2025b)*. Artikel ini telah memperluas argumen tersebut ke ranah demokrasi dan nalar publik, dengan menunjukkan bagaimana Sabda dan Tetrad dapat menopang arsitektur tata kelola kebenaran demokratis yang menghindari baik

sekularisme kosong maupun teokrasi penuh ketakutan. Artikel berikutnya dalam seri ini akan menerapkan arsitektur ini secara lebih ketat pada ranah hukum dan kecerdasan buatan, dengan menanyakan bagaimana sistem hukum dan infrastruktur AI dapat dirancang, ditafsirkan, dan dikelola sehingga menjadi instrumen tata kelola kebenaran yang menghormati martabat manusia dan telos di bawah Sabda, alih-alih menjadi mesin bagi bentuk-bentuk baru dominasi atau proseduralisme kosong *(O'Neil 2016; Cath 2018; Floridi and Cowls 2019)*.

Daftar pustaka

Anderson, E. (1999). What is the point of equality. *Ethics*, 109(2), 287–337.

Andorno, R. (2013). Human dignity and human rights. In D. Beyleveld, R. Brownsword, and

R. Andorno (Eds.), *Human Dignity in Bioethics and Law* (pp. 123–136). Oxford: Oxford University Press.

Audi, R., and Wolterstorff, N. (1997). *Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Cath, C. (2018). Governing artificial intelligence: Ethical, legal and technical opportunities and challenges. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2133), 20180080.

Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.

Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St Martin's Press.

Fineman, M. A. (2008). The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition. *Yale Journal of Law and Feminism*, 20(1), 1–23.
Floridi, L., and Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1–15.

Forst, R. (2012). *The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory of Justice*. New York: Columbia University Press.

Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25/26, 56–80.

Fraser, N. (2008). *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Cambridge: Polity Press.

Galeotti, A. E. (2015). *Political Self-Deception*. Cambridge: Cambridge University Press.

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (W. Rehg, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.

Habermas, J. (2006). Religion in the public sphere. *European Journal of Philosophy*, 14(1), 1–25.

Habermas, J. (2008). Notes on a post-secular society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29.

Jonas, H. (1984). *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press.

Kittay, E. F. (1999). *Love's Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency*. New York: Routledge.

Larmore, C. (1996). *The Morals of Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press.

MacIntyre, A. (1981). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

Meilaender, G. (2009). *Neither Beast nor God: The Dignity of the Human Person*. Wilmington, DE: ISI Books.

Mutaqin, A. Z. (2025a). *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*. OSF Preprints. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V

Mutaqin, A. Z. (2025b). The Cohesive Tetrad as an epistemic ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms. *OSF Preprints / PhilArchive*. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V

Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge, MA: Belknap Press.

O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown.

Pellegrino, E. D. (1999). The goals and ends of medicine: How are they to be defined. *Theoretical Medicine and Bioethics*, 20(5), 393–409.

Quong, J. (2011). *Liberalism Without Perfection*. Oxford: Oxford University Press.

Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.

Rawls, J. (1997). The idea of public reason revisited. *The University of Chicago Law Review*, 64(3), 765–807.

Sangiovanni, A. (2017). *Humanity without Dignity: Moral Equality, Respect, and Human Rights*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sulmasy, D. P. (2002). A biopsychosocial spiritual model for the care of patients at the end of life. *The Gerontologist*, 42(special issue III), 24–33.

Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Cambridge, MA: Belknap Press.

Waldron, J. (2012). *Dignity, Rank, and Rights* (M. Kramer, Ed.). Oxford: Oxford University Press.